

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang terletak di kawasan tropis mempunyai sumber kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan tersebut meliputi hasil hutan, tambang, perikanan dan kelautan, pertanian, berbagai jenis tanaman, hewan, dan sebagainya. Kekayaan alam dapat menambah pendapatan bagi negara. Pemerintah daerah dan masyarakat diberikan tanggung jawab secara penuh untuk mengelola kekayaan negara sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk kesejahteraan serta kemakmuran hidup masyarakat (Haryanti, 2019).

Umumnya setiap negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat. Pada suatu negara kesejahteraan sangat penting diberikan (Hutagalung & Batubara, 2021). Jika suatu negara sejahtera maka terdapat perkembangan. Selain itu, terdapat kenaikan pendapatan serta keberhasilan pembangunan sehingga masyarakatnya juga akan sejahtera. Pada tiap-tiap daerah di Indonesia, dalam pembangunan selalu mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan keadilan atau pemerataan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terbagi menjadi lima pulau besar yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua menjadikan perbedaan kinerja perekonomian. Provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi kinerja perekonomian regional yaitu dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, serta DKI Jakarta yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi pada tahun 2021 yaitu Rp2.914.581 dengan satuan milyar rupiah (BPS, 2021). Provinsi Gorontalo

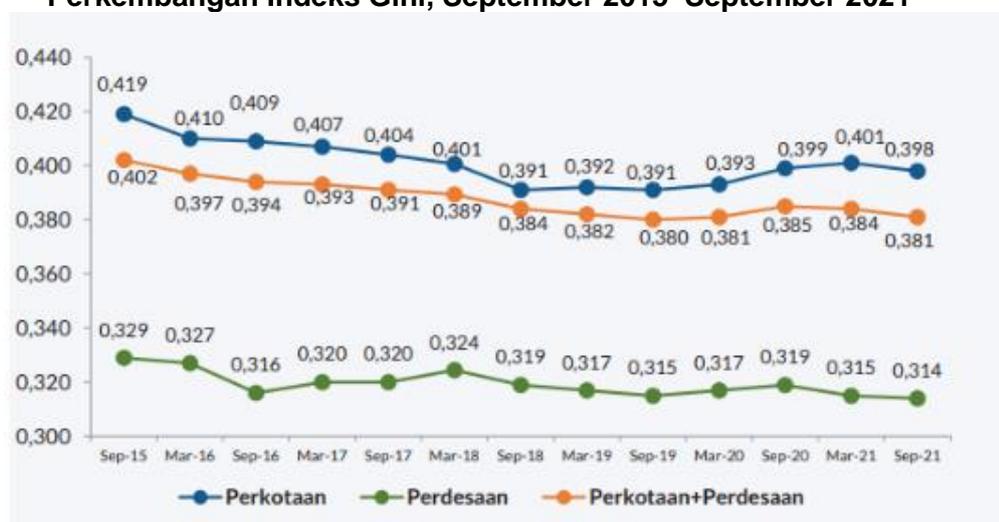
memiliki Produk Domestik Regional Bruto terendah sebesar Rp43.896 dalam satuan milyar rupiah dimana selisih antara daerah Produk Domestik Regional Bruto tinggi dengan rendah sangat jauh. Tiap-tiap daerah yang terpisah oleh pulau dan provinsi memiliki karakteristik dalam meningkatkan kemajuan perekonomian dan memiliki pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang selalu meningkat dibanding dengan periode sebelumnya (Alisjahbana & Akita, 2020). Namun, ketika pertumbuhan ekonomi naik, ketimpangan pendapatan juga semakin tinggi. Selain pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan harus dapat diatasi oleh pemerintah daerah.

Salah satu fokus yang ingin dicapai seluruh bangsa di dunia adalah pengurangan ketimpangan yang dimuat pada *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs yaitu kesepakatan pembangunan secara mendunia dan telah disetujui oleh semua kepala negara. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang harapannya bisa diraih pada tahun 2030 (SDGs, 2017). Pengurangan ketimpangan merupakan target SDGs nomor sepuluh. Target SDGs ini juga diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Secara umum, ketimpangan merupakan indikator penting pembangunan ekonomi. Ketimpangan pendapatan yaitu keadaan perbedaan kemakmuran ekonomi si kaya dengan si miskin dan diukur dari perbedaan pendapatan. Akibatnya akan terjadi kesenjangan antara yang kaya semakin kaya begitu pula sebaliknya (Roy et al., 2019). Menariknya, fenomena ini tidak selalu dipandang negatif. Hal ini karena bisa menjadi insentif untuk bekerja lebih keras dan mengambil lebih banyak risiko dengan menghasilkan inovasi (Raeskyesa, 2020).

Untuk mengetahui ketimpangan pendapatan, digunakan indeks gini. Indeks gini menunjukkan adanya perubahan distribusi pendapatan masyarakat. Selain itu, indeks gini yang lebih besar berimplikasi pada buruknya distribusi pendapatan dan sebaliknya. Kisaran indeks gini Indonesia antara 0,3 dan 0,4. Kisaran tersebut dianggap sebagai tingkat ketimpangan yang moderat (Rachmawati et al., 2021).

Gambar 1.1
Perkembangan Indeks Gini, September 2015–September 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022e)

Berdasarkan gambar 1.1, indeks gini Indonesia sebagai ukuran ketimpangan telah berubah dari tahun ke tahun. Secara nasional, angka indeks gini mengalami penurunan. Pada September 2015 nilai indeks gini sebesar 0,402 menjadi 0,381 pada September 2021. Akan tetapi, indeks gini mengalami kenaikan pada Maret 2020 dan September 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Kehidupan perkotaan dicirikan oleh kesuburan yang rendah dan pembangunan manusia yang tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Namun di Indonesia, ketimpangan pendapatan yang tinggi justru terjadi di perkotaan (Taresh A et al., 2021). Di perkotaan indeks gini lebih

besar daripada di perdesaan. Pada September 2021 (gambar 1.1) angka indeks gini sebesar 0,314 di perdesaan sedangkan di perkotaan sebesar 0,398.

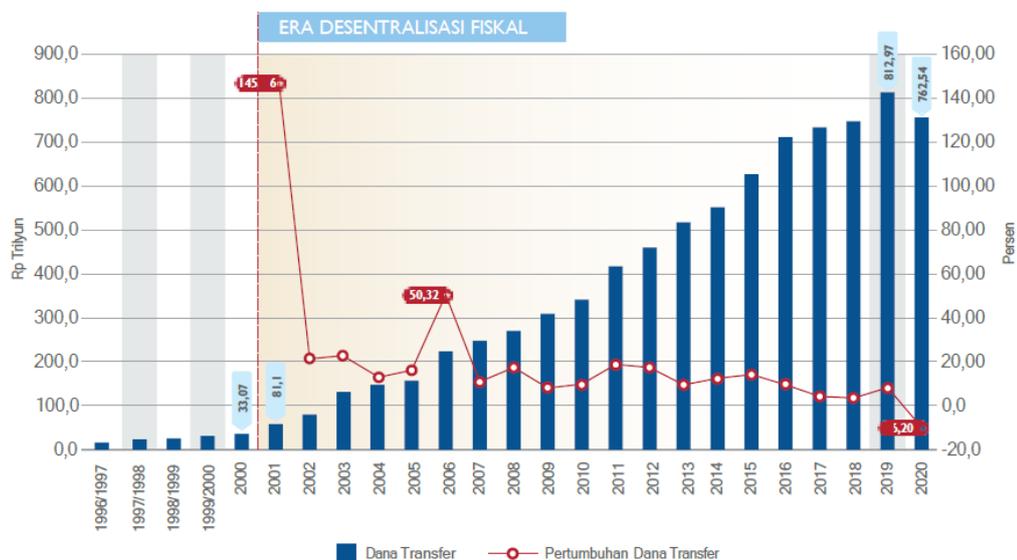
Indeks gini tiap provinsi di Indonesia berbeda. Data indeks gini bulan September tahun 2021 berdasarkan Badan Pusat Statistik (2022b) pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indeks gini paling besar yaitu 0,436. Kemudian disusul provinsi DKI Jakarta dengan nilai 0,411. Sementara indeks gini paling kecil yaitu 0,247 pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini berarti tingkat ketimpangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat tinggi sedangkan di Kepulauan Bangka Belitung cukup rendah.

Untuk mengurangi ketimpangan antar daerah guna kesejahteraan masyarakat, Indonesia memulai desentralisasi politik, administrasi dan fiskal pada tahun 2001 (Alisjahbana & Akita, 2020). *Grand design* desentralisasi fiskal Indonesia telah dirumuskan untuk implementasi desentralisasi fiskal. Visi, misi, tujuan, dan strategi kebijakan desentralisasi fiskal dalam jangka panjang hingga tahun 2030 telah dimuat pada *grand design* desentralisasi fiskal. Visi menuju tahun 2030 yaitu distribusi sumber daya nasional yang berdaya guna dengan hubungan keuangan pusat dan daerah yang terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan (Puspita et al., 2021:11).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal harus ditinjau sebagai suatu sistem yang menyeluruh (Purbadharmaja et al., 2019). Kondisi minimal yang diperlukan oleh daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, misalnya pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang cukup untuk menghimpun penerimaan dan diberikan pertanggungjawaban yang cukup dalam

pengeluaran. Sumber daya ekonomi dan keuangan daerah adalah faktor penting untuk mendukung implementasi sistem desentralisasi fiskal di daerah.

Gambar 1.2
Perkembangan Dana Transfer Tahun 1996-2020



Keterangan: 1996/1997 - 1999/2000: NK dan APBN; 2000 - 2003 : PAN; 2004-2020 LKPP

Sumber: Puspita et al. (2021:17)

Pelaksanaan desentralisasi fiskal juga bisa menimbulkan ketimpangan pendapatan dan tidak meratanya pengoptimalan sumber daya ekonomi yang ada di daerah. Faktor utama ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah terletak pada Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA). Wilayah kaya akan sumber daya alam berhak menerima Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dalam jumlah besar. Padahal tujuan desentralisasi adalah pemerataan dan kesejahteraan seluruh daerah (Purbadharmaja et al., 2019). Oleh karena itu, pemerintah pusat mentransfer dana ke pemerintah daerah (Sefira & Budiwitjaksono, 2022). Perkembangan dana transfer dari tahun ke tahun jumlahnya makin besar. Hal ini tercermin pada gambar 1.2.

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa awal diberlakukannya desentralisasi fiskal pada tahun 2001 terdapat kenaikan dana transfer yang tinggi sebesar 145,06%. Pada tahun 2000 sebesar Rp33,07 triliun menjadi Rp81,05 triliun pada tahun 2001. Sebelum tahun 2001 jumlah dana transfer masih terbilang sangat kecil dengan rata-rata Rp24,77 triliun tahun 1996-2000. Pelaksanaan desentralisasi fiskal selama dua dekade, mengalami peningkatan signifikan pada dana transfer. Dana transfer tahun 2019 sebesar Rp812,97 sedangkan tahun 2001 sebesar Rp81,05 triliun. Akan tetapi, pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan karena dampak pandemi covid-19 yaitu sebesar Rp762,54 triliun (Puspita et al., 2021:17).

Transfer sumber daya keuangan ke daerah dalam jumlah signifikan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah. Hal ini tercermin dalam gambar 1.1 dan gambar 1.2. Dimana gambar 1.2 mendeskripsikan bahwa angka transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terus mengalami kenaikan dan diikuti angka indeks gini dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan (gambar 1.1). Selanjutnya dana transfer mengalami penurunan pada tahun 2020 dan diikuti kenaikan angka indeks gini pada tahun 2020 namun turun kembali pada tahun 2021. Dalam pembangunan Indonesia, tantangan utama bukan lagi pada penyediaan dana yang diperuntukkan bagi daerah-daerah miskin, melainkan memastikan bahwa daerah tersebut memanfaatkan dana dengan sebaik mungkin (Purbadharmaja et al., 2019). Otonomi daerah diharapkan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah yang akan memengaruhi pencapaian tujuan desentralisasi di daerah.

Terdapat inkonsistensi penelitian terdahulu mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian menurut Sukma et al. (2019) pada pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membuktikan bahwa desentralisasi fiskal memengaruhi ketimpangan pendapatan secara positif dan signifikan. Hal ini sama dengan hasil penelitian Triyono et al. (2021) dan penelitian Rachmawatie (2021) dengan indikator Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, hasil penelitian Bojanic & Collins (2021) desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan yang berarti ketimpangan pendapatan bisa dikurangi dengan adanya desentralisasi fiskal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kharisma & Hanifah (2020). Sementara itu, berdasarkan penelitian Roy et al (2019) desentralisasi fiskal tidak memengaruhi ketimpangan pendapatan daerah. Sementara itu, temuan dari penelitian terbaru yang dilakukan Hung & Thanh (2022) desentralisasi fiskal memengaruhi ketimpangan pendapatan dengan model non-linier dan terdapat perbedaan pengaruh variabel yang merepresentasikan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan.

Alasan dipilihnya lokasi objek penelitian pemerintah provinsi di Indonesia karena lingkungannya yang lebih luas. Selain itu, wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke, wilayah yang dibagi menjadi lima kepulauan besar, wilayah yang dipisahkan oleh lautan. Tentunya memiliki karakteristik dan perbedaan potensi daerah. Selain itu, pemerintah provinsi berada di daerah tingkat I dan terdapat daerah – daerah khusus serta daerah istimewa. Sementara itu, daerah tingkat II tidak terdapat daerah khusus maupun daerah istimewa.

Dengan adanya fenomena dan fakta yang sudah dideskripsikan, maka penting dilakukan kembali penelitian mengenai model non-linier desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan variabel mediasi yaitu pertumbuhan ekonomi sejalan dengan penelitian Triyono et al. (2021) dengan lokasi penelitian dan periode yang berbeda. Penelitian dengan model non-linier masih jarang dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin menguji kembali apakah desentralisasi fiskal akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia periode 2017-2021. Data yang dijadikan sebagai bahan penelitian bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), portal data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, portal satu data perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang kemudian akan diolah menjadi informasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Mediasi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan, rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

- a. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia?
- b. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

pada pemerintah provinsi di Indonesia?

- c. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia?
- d. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan daerah melalui pertumbuhan ekonomi pada pemerintah provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia.
- b. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah provinsi di Indonesia.
- c. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia.
- d. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah melalui pertumbuhan ekonomi pada pemerintah provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat ataupun kontribusi antara lain:

- a. Manfaat dalam pengembangan ilmu (teoritis)

Diharapkan riset ini memberikan pemahaman tentang ketimpangan pendapatan daerah dan sebagai kontribusi tambahan bukti empiris

pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia yang dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi.

- b. Manfaat operasional (praktis)
 - 1. Penelitian ini dapat digunakan untuk informasi tambahan terkait dengan ketimpangan pendapatan daerah di Indonesia yang dapat memberikan gambaran terkait kondisi fiskal antar daerah di Indonesia.
 - 2. Dapat digunakan untuk membantu pemerintah terkait otonomi daerah untuk pertimbangan pengambilan kebijakan-kebijakan penting.